

PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Budhi Pamungkas Gautama, Ayu Krishna Yulawati, Netti Siska Nurhayati,
Endah Fitriyani, Ilma Indriasri Pratiwi**

Universitas Pendidikan Indonesia
budhipamungkas@upi.edu

Abstract

The tourist village is one of the tourist attractions that can be developed and made a positive contribution to society. In building a tourist village, the important thing is a commitment between the government and village officials, community leaders and village organizations to make the village a tourist village. Based on the results of a study on the potential development of a tourism village in Pagerageung, Tasikmalaya District, the Tourism and Culture Office of West Java Province still needs to increase knowledge of human resources, so the role of academics is needed to provide village tourism literacy to village communities in Pagerageung. This article described community service programs through the development of partnership-based assisted villages in Pagerageung, Tasikmalaya District. The method used is the initial survey, training, mentoring, monitoring and evaluation. The initial survey carried out focused on the potential of tourism villages, understanding of tourist villages in the community, as well as problems that exist in the community in building tourist villages. The initial survey is review to provide training and assistance according to community needs in managing tourism villages. With this method, it hopes that it can help develop a tourism village and solve problems in the community in managing a tourist village, besides that this article also explains the importance of tourism village literacy for the community as an important role holder in developing a tourist village.

Keywords: *Tourism Village Development, Community Empowerment, Community Service.*

Abstrak

Desa wisata merupakan salah satu atraksi wisata yang dapat dikembangkan serta memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Dalam membangun desa wisata hal yang penting ialah sebuah komitmen antara pemerintah serta aparat desa, tokoh masyarakat dan organisasi desa untuk menjadikan desa sebagai desa wisata. Berdasarkan hasil kajian potensi pengembangan desa wisata Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat masih perlu peningkatan pengetahuan sumber daya manusia, maka diperlukannya peran akademisi untuk memberikan literasi desa wisata pada masyarakat desa di Pagerageung. Artikel ini menjelaskan tentang program pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan desa binaan berbasis kemitraan di Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah survey awal, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Survey awal yang dilakukan berfokus pada potensi desa wisata, pemahaman desa wisata di masyarakat, serta masalah yang ada di masyarakat dalam membangun desa wisata. Survey awal dikaji untuk memberikan pelatihan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Dengan metode tersebut diharapkan dapat turut membantu mengembangkan desa wisata dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dalam mengelola desa wisata, selain itu artikel ini juga menjelaskan pentingnya literasi desa wisata untuk masyarakat sebagai pemegang peran penting dalam mengembangkan desa wisata.

Kata Kunci: Pengembangan Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pengabdian Masyarakat.

Submitted: 2020-08-25	Revised: 2020-09-16	Accepted: 2020-09-18
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Dalam mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan pendekatan pengembangan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata. Salah satu desa yang masih dalam tahap perintisan desa wisata ialah Desa Kecamatan Pagerageung, dan membutuhkan bimbingan bagi masyarakat untuk dapat mengelola kegiatan pariwisata secara professional.

Kecamatan Pagerageung terletak di Kabupaten Tasikmalaya paling utara, berbatasan dengan lembah Gunung Cakrabuana sebelah selatan, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis (Panjalu), bagian Utara dengan Ciamis (Desa Sindangbarang) dan Kabupaten Majalengka (Kecamatan Lemahsugih), bagian barat berbatasan dengan Kabupaten arut (Malangbong) dan kecamatan Kadipaten, serta sebelah Selatan dengan Kecamatan Ciawi. Kecamatan Pagerageung memiliki desa, diantaranya Desa Cipacing, Sukamaju, Pagersari, Pagerageung, Sukadana, Puteran, Tanjungkerta, Guranteng, naggewer, dan Sukapada. Dari sepuluh desa baru ada 5 desa yang memiliki daya tarik wisata, yaitu Desa Naggewer, Desa Guranteng, Desa Sukapada, Desa Cipacing, dan Desa Pagersari.

Aksesibilitas menuju Kecamatan Pagerageung dan desa di sekitar Pagerageung memiliki jalan yang sudah baik, ruas jalan desa sudah beraspal namun jalan menuju pralayang Bukit Harmoni masih ada jalan rusak dan menuju perkebunan kondisinya masih tanah dan berbatu, sedangkan akses transportasi untuk Desa Pagersari masih dilalui angkutan umum sedangkan 4 desa lain tidak ada/dilewati kendaraan umum, sehingga wisatawan lebih leluasa jika menggunakan kendaraan pribadi atau sewa (mini bus). Akses transportasi menuju tempat wisata Pasir Krisik di Desa Guranteng hanya bisa dilalui kendaraan kecil (mini bus), sehingga untuk wisatawan yang mengunjungi dengan bus besar kedepannya akan dilokalisasi di lahan parkir dekat Bumdes dan untuk transport ke lokasi tempat wisata disewakan fasilitas kendaraan kecil.

Potensi daya tarik yang dimiliki oleh kelima desa di Kecamatan Pagerageung digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Potensi Desa Kecamatan Pagerageung

Sumber: Peneliti, 2019

Dari Gambar 1 diatas, terlihat potesi dari kelima desa yang memiliki potensi dijadikan desa wisata, masing-masing desa memiliki keunikan yang berbeda sehingga dapat menjadi daya tarik wisata desa yang menarik dan memberikan pengalaman yang beragam bagi wisatawan. Keterlibatan masyarakat belum dilakukan dengan optimal dikarenakan masyarakat belum memiliki pengetahuan yang banyak mengenai pengelolaan desa wisata. Pada Tabel 1 dibawah ini merupakan fenomena sosial yang ada di masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.

Tabel 1. Fenomena Sosial Masyarakat Desa Kecamatan Pagerageung dalam Pengembangan Desa Wisata

Desa	Fenomena Sosial
Guranteng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat berharap adanya sponsor untuk membangun penginapan 2. Program Bumdes masih seumur jagung 3. Peranan Bumdes hanya menjadi distributor untuk warung 4. Masyarakat guranteng belum bangga dengan potensi yang dimiliki oleh desa 5. Ada sosialisasi wisata dengan kebersihan terutama di peternakan sapi 6. Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pariwisata 7. Masyarakat ingin pendampingan dan pembinaan khusus bagaimana mengemas pariwisata, sehingga bisa menjual Desa Wisata di Guranteng bisa sekitar 1-2 malam
Cipacing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat belum paham pengelolaan kepariwisataan desa wisata
Nangewer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat masih menganggap pariwisata itu banyak mudarat 2. Membutuhkan biaya infrastruktur yang besar untuk pengelolaan desa wisata 3. Dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam ke masyarakat bahwa pariwisata bisa menghasilkan pendapatan 4. Berharap langkah pengembangan dikelola oleh Bumdes 5. Pelatihan Pariwisata untuk Pemuda Desa (Karang Taruna)
Pagersari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih mininya pengetahuan tentang pariwisata 2. Dibutuhkan adanya sosialisasi bagaimana memaknai pariwisata sehingga dapat menjadi pencerahan kepada alim ulama 3. Belum ada informasi pengelolaan desa wisata dalam aspek pemodalan dan pemasaran
Sukapada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat takut kalau ada wisatawan yang datang mendatangkan banyak mudarat, bertentangan dengan alim ulama (murrobi)

Sumber: Peneliti, 2019

Dari fenomena sosial yang ada di lima desa tersebut terlihat mayoritas permasalahan ialah masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dan konflik sosial dari kaum ulama yang memiliki pemahaman kegiatan pariwisata banyak mengandung hal-hal negatif. Sehingga melihat fenomena tersebut diperlukan

literasi dan pelatihan wisata desa bagi masyarakat yang memiliki peranan penting dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, sumber lain dari hasil kajian potensi pengembangan desa wisata Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa masih perlu peningkatan pengetahuan sumber daya manusia (pengelola desa, organisasi desa, masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dengan pariwisata) (Afriza, 2019). Oleh karena itu, Universitas Pendidikan Indonesia melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Binaan Berbasis Kemitraan memberikan pelatihan untuk masyarakat desa Kecamatan Pagerageung. Pelatihan ini dilaksanakan di kecamatan Pagerageung yang diikuti oleh lima kepala desa, bumdes dan karang taruna desa dengan agenda pelatihan diawali dengan survey awal pada tanggal 23 Juli 2019 dan pelatihan di tanggal 14 Agustus 2019. Sementara monitoring dan evaluasi dilakukan hingga bulan Desember 2019 dengan waktu yang fleksibel menyesuaikan kebutuhan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi desa wisata pada masyarakat desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif terhadap pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan kewirausahaan dan pariwisata. Sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu nasional dan global melalui penelitian pemberdayaan ekonomi di bidang pariwisata.

1. Konsep Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya (Dewi, n.d.)

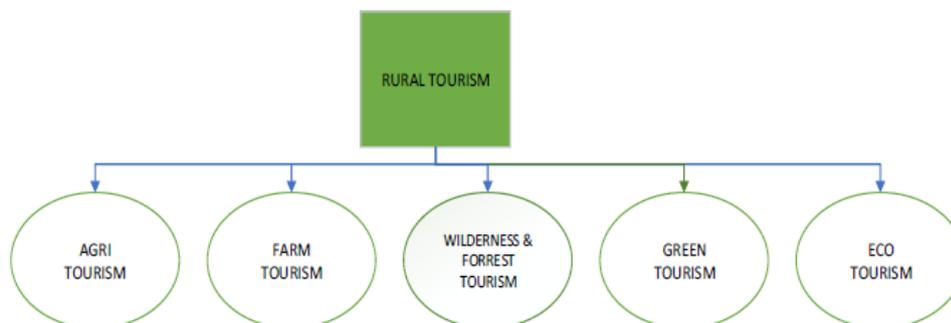
Desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat (Inskeep, 1991)

Menurut Macdonald and Jollif (MacDonald & Jolliffe, 2003) (dalam (Kiper & zdemir, 2012)):

Rural tourism refers to a distinct rural community with its own traditions, heritage, arts, lifestyles, places, and values as preserved between generations. When tourists visit these areas, they are well informed about the culture and experienced folklore, customs, natural landscapes, and historical landmarks. They may also enjoy other activities in a rural setting such as nature, adventure, sports, festivals, crafts, and general sightseeing.

Konsep di atas menjelaskan bahwa rural tourism merupakan sebuah daerah wisata yang mengacu pada masyarakat pedesaan yang memiliki tradisi sendiri, warisan seni, gaya hidup, tempat, serta nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi, dimana ketika wisatawan berwisata ke daerah tersebut, wisatawan akan mendapatkan informasi tentang kebudayaan dan pengalaman akan cerita rakyat, adat istiadat, pemandangan.

Menurut Sharpley and sharpley (1997) dalam (Roberts & Hall, 2001) di dalam *Rural Tourism* terdapat jenis wisata lain yang membentuknya, yaitu *Agritourism, farm tourism, wilderness and foresttourism, green tourism, dan ecotourism* :



Gambar 2. Jenis Wisata

Sumber: Sharpley and sharpley (1997) (dalam Roberts & Hall, 2001)

Rural Tourism merupakan suatu konsep yang digunakan untuk merumuskan seluruh kegiatan wisata yang dilakukan di daerah pedesaan. Terdapat tiga konsep utama dalam komponen desa wisata yaitu (Nurhayati, 1993) :

1. Akomodasi: Sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan unit-unit berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
2. Atraksi: Seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat, beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.
3. Keindahan alam, keunikan dan kelangkaan desa wisata itu sendiri.

Pada pendekatan ini diperlukan beberapa kriteria yaitu :

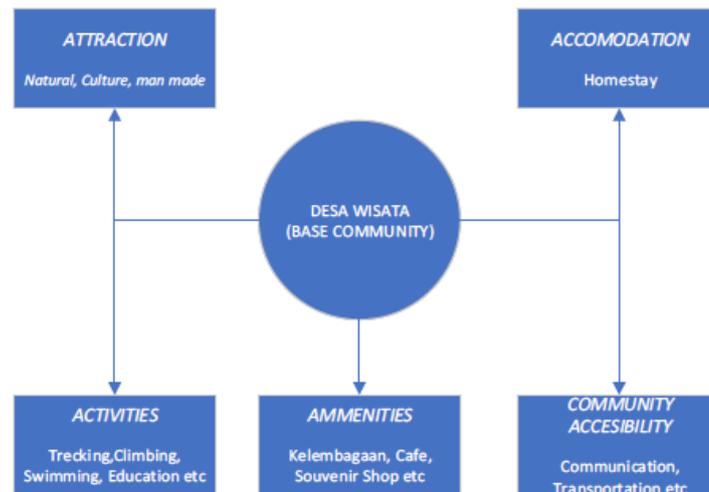
1. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
2. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
3. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
4. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
5. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, *drainase*, telepon dan sebagainya.

Hal yang harus dimiliki oleh desa wisata :

1. Keunikan, keaslian, sifat khas (*Local Genius*);
2. Memiliki/ berdekatan dengan daerah/ alam yang luar biasa;

3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat budaya yang menarik minat pengunjung (pemberdayaan);
4. Memiliki peluang untuk berkembang, baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Pada skema pengembangan desa wisata berdasarkan *base community*, terdapat pada gambar berikut ini :



Gambar 3. Skema Pengembangan Desa Wisata Berdasarkan *Base Community*

Sumber: (Afriza & Darmawan, 2018)

Beberapa hal/ kegiatan yang menjadikan desa tersebut sebagai desa wisata antara lain:

- a. Kerajinan menjadi Desa Wisata berbasis Kerajinan.
- b. Seni budaya menjadi Desa Wisata berbasis Seni Budaya.
- c. Pertanian menjadi Desa Wisata berbasis Pertanian.
- d. Peninggalan wali/ tokoh agama menjadi Desa Wisata berbasis Ritual.
- e. Keindahan alam lingkungan menjadi Desa Wisata berbasis Nuansa Alam.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal (Wearing & McDonald, 2002)

Dukungan masyarakat sekitar atau yang disebut juga *Community Based Tourism* merupakan hasil pengembangan masyarakat adalah untuk menyediakan pembangunan peluang yang mendistribusikan manfaat yang tidak ada di seluruh komunitas. Manfaat ini termasuk pengembalian ekonomi, sementara juga memberdayakan komunitas dengan

keterampilan dan sumber daya untuk mengembangkan perusahaan pariwisata berkelanjutan (Harwood, 2010).

Pengelolaan desa wisata diharapkan akan berkembang dengan baik, salah satunya melalui perencanaan berbasis masyarakat. Perencanaan berbasis masyarakat adalah bentuk perencanaan yang berfokus pada tingkat akar rumput komunitas sebagai alternatif dari pendekatan top down (de Beer, 2005). Ada banyak definisi sebuah komunitas dari para ahli. Geografer menekankan aspek spasial dalam definisi mereka, para ekonom memeriksa pekerjaan dan pasar sedangkan sosiolog menekankan interaksi sosial dan jaringan di dalamnya merupakan definisi komunitas (Kumar, 2005). Secara umum, berbagai definisi komunitas semuanya menggunakan beberapa kombinasi ruang, orang, dan interaksi sosial (Kumar, 2005). Untuk keperluan penelitian ini istilah tersebut komunitas akan merujuk pada orang-orang yang diidentifikasi oleh seseorang di tempat tertentu (Campbell & Fainstein, 2003).

Dalam pola pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, peran masyarakat menjadi sangat penting. "Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat" (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995). Sementara itu (Adiyoso, 2009) menegaskan bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan.

Model pemberdayaan masyarakat menurut (Dhamotharan, 2009) diantaranya melalui pendekatan 7D yang dimulai dengan memberikan penghargaan terhadap potensi dan prestasi masyarakat serta nilai-nilai murni yang ada dalam masyarakat tersebut. Dilanjutkan kemudian dengan mendorong masyarakat untuk menyadari ketersediaan sumber daya yang dimiliki serta menganalisis kekuatan dan kelemahan masyarakat. Pendekatan 7D terdiri dari tahapan sistematis sebagai berikut:

1. D1 – Developing relation (Mengembangkan hubungan), Pada tahap ini adanya suatu hubungan yang saling percaya diantara anggota kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan pihak luar seperti fasilitator, narasumber, pejabat pemerintah dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal ini perlu disediakan waktu yang cukup bagi semua orang saling mengenal lebih dalam, tentang diri masing-masing sehingga dapat menghargai kemampuan masing-masing untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat.
2. D2 – Discovering capacities (Menemukan kapasitas), Pada tahap ini masyarakat mencoba mengenali dan menyadari prestasi masyarakat di masa lalu dan juga mengetahui masalah-masalah yang masyarakat hadapi pada saat itu, bagaimana masyarakat dapat memecahkannya, serta struktur organisasi apa yang digunakan. Masyarakat mencoba menemukan dan memahami apa yang telah dimiliki, apa kekuatan dan kelemahan masyarakat, dan apa potensi sumberdaya yang dapat digunakan.
3. D3 – Dreaming of community future (Membangun cita-cita masyarakat), Pada tahap ini masyarakat didorong untuk menyatakan cita-cita masyarakat. Cita-cita adalah suatu gambaran kreatif tentang masa depan yang positif. Setelah memiliki cita-cita, masyarakat kemudian mengembangkannya menjadi visi. Visi adalah terjemahan

sebuah cita-cita menjadi gambaran jangka panjang yang menarik dan jelas, yang mampu menumbuhkan suatu komitmen yang kuat serta motivasi dan arah untuk bertindak.

4. D4 – Directions of community actions (Arah tindakan masyarakat), Pada tahap ini masyarakat menetapkan tujuan yang jelas bagi kegiatan-kegiatan masyarakat. Tujuan hendaknya dirumuskan dengan jelas dan disetujui oleh masyarakat.
5. D5 – Designing community actions (Merancang tindakan masyarakat), Pada tahap ini masyarakat merancang tindakan dengan menerjemahkan visi, tujuan dan kegiatan-kegiatan ke dalam suatu rencana dengan struktur yang jelas dan logis. Selama proses pembuatan rencana, masyarakat harus mencoba untuk menggunakan sumberdaya internal di samping juga sumberdaya eksternal, misalnya yang berasal dari pemerintah dan organisasi non pemerintah.
6. D6 – Delivering Planned Activities (Melaksanakan kegiatan), Masyarakat melaksanakan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini input internal dan eksternal harus diatur sehingga kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan sukses. Pengawasan yang ketat penting untuk meyakinkan bahwa kegiatan dilaksanakan dan perubahan-perubahan yang diperlukan telah dibuat.
7. D7 – Documenting Outputs, Outcomes and Learning (Mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari), Dalam tahap ini masyarakat melakukan refleksi terhadap “proses perjalanan” dan hasil yang telah dicapai. Refleksi dilakukan oleh kelompok masyarakat beserta semua pihak luar yang terlibat. Dokumentasi merupakan evaluasi terhadap proyek dan rencana aksi untuk menilai keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dokumentasi terdiri dari analisis, berbagi pengalaman, dan merangkum semua pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari dari tahapan-tahapan sebelumnya (Dhamotharan, 2009).

Metode

Pada kegiatan ini tim menggunakan model 7D pemberdayaan masyarakat melalui beberapa metode untuk menyelesaikan masalah dari fenomena yang ada di masyarakat, yaitu survey awal, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Pada survey awal, tim melakukan dengan wawancara curah pendapat (*brainstorming*) mengumpulkan masyarakat dan aparat desa untuk mengetahui potensi daya tarik masing-masing desa, hambatan kegiatan pariwisata, pengelolaan desa wisata yang diharapkan, dan pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan desa wisata.

Tahap selanjutnya ialah pelatihan, setelah memperoleh data mengenai daya tarik desa, fenomena atau masalah apa yang ada sehingga terbentuk pelatihan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan desa wisata. Pelatihan ini diikuti juga oleh seluruh aparat desa, bumdes, dan karang taruna dari kelima desa di Kecamatan Pagerageung. Pelatihan dengan menggunakan media powerpoint dan video untuk memberikan literasi pariwisata, bumdes, pengelola keuangan, dan pemasaran desa wisata dilakukan secara interaktif dibawakan oleh pemateri dari tim peneliti.

Setelah pelatihan, tim membuat pendampingan melalui media online (WA Group) untuk mempermudah mendampingan jarak jauh dan secara aktif memberikan presenden cara mengelola desa wisata dari desa wisata yang sudah maju serta masukan-masukan

lainnya sesuai kebutuhan. Metode terakhir ialah tim monitoring kembali ke desa dengan melihat kegiatan pariwisata apa saja yang sudah dilakukan dan mengevaluasi program pengabdian pada masyarakat ini melalui kuesioner yang dibagikan pada peserta pelatihan yang terdiri dari aparat desa (camat dan kepala desa), bumdes, dan karang taruna sehingga program pengabdian pada masyarakat ini dapat terukur keberhasilannya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini didapatkan dari metode survey awal, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Dalam upaya mengembangkan desa wisata di kecamatan Pagerageung peneliti memakai model pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan 7D, menurut (Dhamotharan, 2009) pendekatan 7D yang dimulai dengan memberikan penghargaan terhadap potensi dan prestasi masyarakat serta nilai-nilai murni yang ada dalam masyarakat tersebut. Dilanjutkan kemudian dengan mendorong masyarakat untuk menyadari ketersediaan sumber daya yang dimiliki serta menganalisis kekuatan dan kelemahan masyarakat. Hasil dari penerapan 7D di Kecamatan Pagerageung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penerapan Model Pemberdayaan Masyarakat

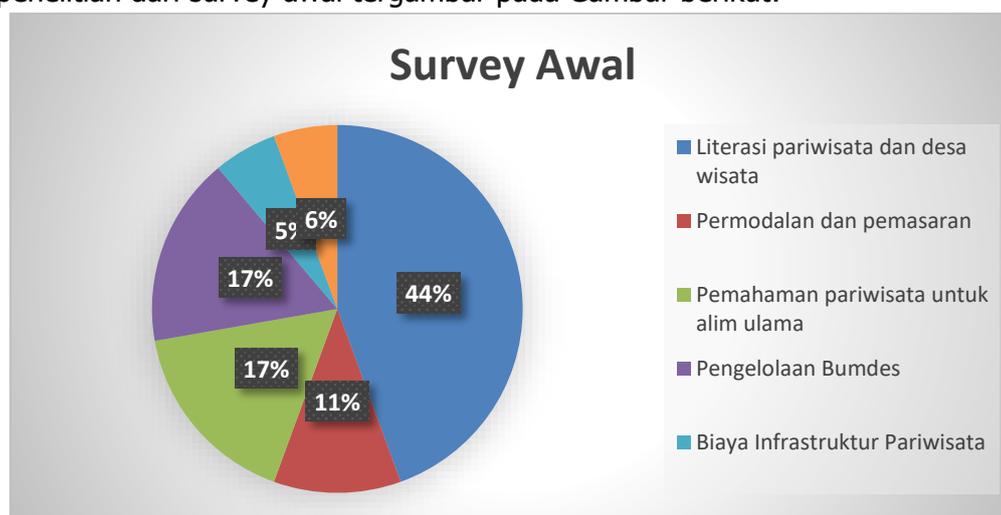
Model 7D	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Developing relation (Mengembangkan hubungan)	Melakukan kunjungan Survey Awal dengan melibatkan Camat, Kepala Desa Cipacing, Kepala Desa Nangewer, Kepala Desa Guranteng, Kepala Desa Sukapada, Kepala Desa Pagersari, Pengelola Bumdes dan Karang Taruna tiap desa. Dalam kunjungan awal ini, peneliti mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan ke Desa dan mendapatkan sambutan yang baik, saling berkenalan, mendapatkan kontak untuk memudahkan hubungan secara berkala dengan membuat group WA.
Discovering capacities (Menemukan kapasitas)	Kegiatan survey awal dilakukan juga sebagai agenda <i>brainstorming</i> (curah pendapat) dari Camat selaku pimpinan tertinggi desa tentang linieritas pariwisata dengan agenda kerja desa, dan dari kelima Kepala Desa untuk mengungkapkan potensi desa yang dimiliki sehingga dapat terlihat kapasitas desa untuk kegiatan pariwisata.
Dreaming of community future (Membangun cita-cita masyarakat)	Dari kegiatan survey awal peneliti menemukan hambatan yang masyarakat rasakan untuk mengembangkan pariwisata di desa, dan mencoba menyamakan persepsi dengan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan dapat meminimalisir urbanisasi.
Directions of community actions (Arah tindakan masyarakat)	Setelah melalui proses survey awal, selanjutnya peneliti merumuskan arah tindakan masyarakat dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diketahui pada kegiatan survey awal. Sehingga didapatkan pelatihan kepariwisataan meliputi manajemen pariwisata, manajemen bumdes, pengelolaan bumdes, manajemen pemasaran pariwisata desa.

Model 7D	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Designing community actions (Merancang tindakan masyarakat)	Melalui pelatihan kepariwisataan, manajemen papriwisata, manajemen bumdes, pengelolaan bumdes, manajemen pemasaran pariwisata desa peneliti memberi arahan untuk merancang konsep kaperiwisataan yang sesuai dengan adat desa dengan konsep desa wisata halal Pagerageung, mengelola bumdes yang benar, dan memberi presenden langsung cara memasarkan desa wisata yang sudah maju.
Delivering Planned Activities (Melaksanakan kegiatan)	Setelah pelatihan masyarakat dapat langsung mengimplementasikan kegiatan pariwisata di desa, dengan group WA yang sudah terbentuk dapat memudahkan peneliti untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil dari pelatihan yang sudah diberikan dan kedepannya bentuk pelatihan apa yang dibutuhkan untuk terus mengembangkan desa wisata di Kecamatan Pagerageung sehingga bisa menjadi desa wisata maju.
Documenting Outputs, Outcomes and Learning (Mendokumentasikan hasil dan hal yang dipelajari)	Tahap mendokumentasikan setiap kegiatan peneliti menggunakan media elektronik berupa kamera, tape recorder, handphone untuk mengabadikan kondisi desa wisata. Peneliti pun membagikan kuesioner yang diberikan pada peserta pelatihan untuk menilai bentuk pelatihan yang diberikan, cara penyampaian materi, dan pelayanan yang diberikan sehingga dapat mengukur <i>outcomes</i> dari kegiatan dan mempelajari apa yang harus diperbaiki.

Sumber: Peneliti, 2019

1. Survery Awal

Hasil penelitian dari survey awal tergambar pada Gambar berikut:



Gambar 4. Hasil Survey Awal

Sumber: Peneliti, 2019

Berdasarkan Gambar 4 tersebut, dapat dilihat masalah/fenomena yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa Kecamatan Pagerageung ialah literasi pariwisata dan desa wisata dengan persentase sebesar 44%, masalah yang kedua ialah pemahaman pariwisata untuk alim ulama sebesar 17% tiga dari lima kepala desa mengatakan hal ini menjadi masalah

yang perlu ditindaklanjuti untuk mengembangkan desa wisata di daerahnya, karena mayoritas penduduk beragama muslim dan daerah tersebut terkenal dengan daerah santri dan memiliki pesantren yang sudah banyak dikenal. Dengan persentasi yang sama yaitu 17%, masyarakat membutuhkan pelatihan pengelolaan bumdes karena bumdes sendiri baru berdiri seumur jagung dan pengelolaannya belum maksimal. Peran bumdes di desa masih sebagai warung / tempat penjualan dari barang yang dijual oleh warga maupun barang kebutuhan warga sehari-hari padahal fungsi dari bumdes tidak seperti itu, dilihat dari definisinya Bumdes adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (*Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 6*, n.d.) Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Bumdes memiliki peranan penting untuk pengelola desa wisata, sebagai contoh dalam penjualan paket wisata desa bumdes berperan untuk memasarkan sampai mengelola keuangan dari hasil penjualan paket wisata dan hasilnya akan digunakan untuk biaya operasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu bumdes juga memiliki peranan dalam mengelola peran karang taruna dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) sebagai pelaksana kegiatan pariwisata di desa, sehingga pengelolaan administrasi desa wisata dibuat tertib dengan dikelola melalui bumdes.

Masalah selanjutnya ialah permodalan dan pemasaran dengan persentase 11%, hal ini terjadi karena masyarakat masih berfikir dalam membangun pariwisata dibutuhkan modal yang besar untuk membuat kerajinan khas desa ataupun makanan khas desa yang akan dijual sebagai oleh-oleh, namun jika bumdes sudah berjalan dengan baik persoalan permodalan dapat dibantu dari berbagai sumber bantuan pemodal dan masyarakat masih belum paham bagaimana memasarkan pariwisata di desa sampai bisa dijual dan dibeli oleh wisatawan sehingga dibutuhkan pelatihan pemasaran online maupun offline.

Aktualisasi potensi desa di masyarakat harus disadarkan, dari beberapa kepala desa menginginkan masyarakat bangga dengan potensi yang dimiliki oleh desa, dengan rasa bangga masyarakat memiliki rasa memiliki dan cinta pada desa dan akan berdampak pada kemajuan desa wisata dan diperlukan pelatihan sadar wisata untuk masyarakat karena untuk menjual desa wisata justru terletak pada keaslian dan keasrian suasana desa yang menjadi daya tarik. Permasalahan selanjutnya ialah biaya infrastruktur desa, walaupun sudah kondisi jalan di desa 70% sudah beraspal namun ada beberapa jalan menuju destinasi wisata yang masih perlu perbaikan sehingga diharapkan ada akses untuk memfasilitasi biaya infrastruktur desa, bisa melalui pendampingan pembuatan proposal yang bisa diajukan ke pihak terkait.

2. Pelatihan

Pelatihan diberikan setelah mendapatkan data survey awal untuk memudahkan pemetaan pelatihan apa yang dibutuhkan oleh desa Kecamatan Pagerageung. Berikut bentuk pelatihan yang diberikan pada tanggal 14 Agustus 2019 di Kecamatan Pagerageung.

Tabel 3. Bentuk Pelatihan

No	Pelatihan	Tujuan
1	Kepariwisataaan	a. Mengedukasi literasi pariwisata dan desa wisata pada masyarakat b. Memberikan pemahaman pariwisata untuk alim ulama c. Aktualisasi potensi desa pada masyarakat
2	Manajemen Pemasaran	a. Memberikan masukan untuk memperoleh permodalan dan cara memasarkan
3	Pengelolaan Bumdes	a. Memberi pengarahan untuk mengelola bumdes sesuai dengan fungsinya b. Memberi pendampingan bumdes agar bisa mendapatkan bantuan/dana untuk infrastruktur desa

Sumber: Peneliti, 2019

3. Pendampingan dan Mentoring

Pendampingan dilakukan peneliti bersamaan dengan dilakukannya pelatihan di Kecamatan Pagerageung pada tanggal 14 Agustus 2019 dan monitoring dilakukan secara berkala dengan mengunjungi kembali Kecamatan Pagerageung dan melalui group whatsapp (WA) yang sudah dibuat oleh tim peneliti dengan anggota group ialah Camat, Kepala Desa Cipacing, Kepala Desa Nangewer, Kepala Desa Guranteng, Kepala Desa Sukapada, Kepala Desa Pagersari, Pengelola Bumdes dan Karang Taruna tiap desa.

4. Evaluasi

Pada tahap evaluasi peneliti menggunakan kuesioner yang dibagikan pada peserta pelatihan sehingga tim peneliti dapat mengukur keberhasilan dari program pengabdian pada masyarakat dan mengetahui kebutuhan pelatiba atau pendampingan selanjutnya untuk desa sehingga Kecamatan Pagerageung dengan kelima desa yang sudah berkembang bisa menjadi desa wisata yang maju.

Adapun hasil evaluasi dari kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini dengan penilaian yang diberi kriteria skala 1-5 dengan nilai: 1 = Sangat tidak baik; 2 = Tidak baik; 3 = Cukup ; 4 = Baik; 5 = Sangat baik

a. Penyajian materi yang diberikan

Dari materi yang diberika peserta menjawab 50% baik dan 50% lainnya memberikan komentar sangat baik. Materi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengelola desa wisata.

b. Penampilan (daya tarik pembicara)

Penilaian peserta ialah 16.78% menyatakan cukup, 66.67% meyatakan baik, dan 16.76 % menyatakan sangat baik sehingga untuk mendapatkan hasil sangat baik, penampilan dan penyajian dari pembicara harus ditingkatkan agar lebih menarik.

c. Fasilitas yang disediakan

Penilaian fasilitas ini dilihat dari tempat dan konsumsi. 50% peserta menyatakan penilaiannya sangat baik, 33.33% baik dan 16,67% menyatakan cukup maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan harus lebih ditingkatkan lagi, karena pada pelatihan tanggal 14 Agustus 2019 tim memfasilitasi peserta untuk pelatihan di Sanggar Seni Bumi Ageung, sedangkan peserta setelah kegiatan menyatakan keinginannya untuk kedepannya diadakan di Kantor Kecamatan Pagerageung.

d. Rencana tindak lanjut

Setelah mengikuti pelatihan dengan sebagian besar peserta merasa mendapat pengetahuan baru yang bermanfaat untuk mengembangkan potensi kepariwisataan di desa, sehingga sebagian besar peserta termotivasi untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dengan saling bekerjasama antar masyarakat, kompepar/pokdarwis dan karang taruna desa.

e. Pelatihan selanjutnya

Pelatihan selanjutnya yang diharapkan oleh masyarakat ialah diadakannya kegiatan lain secara teknis dan bisa membantu mereka mengelola BUMDes yang dikaitkan dengan pengembangan kepariwisataan. Sekaligus tentang keterlibatan peran masyarakat lain untuk pengembangan potensi wisata di desa.

5. Diskusi

Program pengabdian pada masyarakat berbasis kemitraan desa yang dilakukan oleh tim peneliti dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Model 7D pemberdayaan masyarakat yang digunakan memberikan arahan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, dimulai dari *Developing relation, Discovering capacities, Dreaming of community future, Directions of community actions, Designing community actions, Delivering Planned Activities, Documenting Outputs, Outcomes and Learning*. Model tersebut diisi dengan metode survey awal, pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi, dengan dibuatnya WA group pula dinilai sangat memudahkan komunikasi antara tim peneliti dengan masyarakat sehingga tim memiliki desa binaan yang berkelanjutan dan bisa memberikan penampingan lagi untuk tahun selanjutnya.

Kesimpulan

Tim mencoba menyelesaikan masalah pengembangan desa wisata Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya melalui upaya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Program pengabdian ini dapat meningkatkan literasi desa wisata pada masyarakat desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif terhadap pembangunan desa wisata. Peran masyarakat di desa Kecamatan Pagerageung sangat besar dalam pengembangan desa wisata terlihat dari hasil program pengabdian ini dengan antusiasme masyarakat yang menerima dengan baik dan memiliki cita-cita bersama untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata maju. Sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, dapat disimpulkan program ini bisa menyelesaikan isu-isu nasional dan global melalui penelitian pemberdayaan ekonomi di bidang pariwisata.

Program pengabdian pada masyarakat selanjutnya disarankan untuk melakukan pengabdian di masing-masing desa dari lima desa yang sangat berpotensi ini, dengan begitu akan mempercepat pengembangan desa wisata di Kecamatan Pagerageung. Pelatihan secara teknis dalam manajemen pengelolaan Bumdes, pembentukan

pokdarwis/kompepar di masing-masing desa, serta pelatihan pembuatan proposal kerjasama sangat dibutuhkan untuk pelatihan selanjutnya.

Ucapan Terimakasih

Tim peneliti mengucapkan terimakasih pada Camat, Kepala Desa Guranteng, Kepala Desa Pagersari, Kepala Desa Nangewer, Kepala Desa Sukapada, kepala Desa Cipacing dan masyarakat Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya atas penerimaan dan antusiasme yang baik pada program ini serta ucapan terimakasih pada redaktur Jurnal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) yang telah memuat artikel ini. Program pengabdian pada masyarakat berbasis kemitraan ini di danai oleh Universitas Pendidikan Indonesia melalui Program Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dengan nomor SK Nomor: 294/UN40.D/PP/2019.

Daftar Pustaka

- Adiyoso, W. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. ITS Press, Surabaya.
- Afriza, L. (2019, Mei). *Kajian Potensi Pengembangan Desa Wisata Kecamatan Pageragueng Tasikmalaya*. Dinas PARIWISATA dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Afriza, L., Darmawan, H., & Riyanti. (2018). *Pedoman Pengelolaan Desa Wisata*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 67.
- Campbell, S., & Fainstein, S. S. (2003). *Planning Theory*. UK: Blackwell.
- de Beer, F. (2005). Rural communities, the natural environment and development—Some challenges, some successes. *Community Development Journal*, 40(1), 50–61. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi006>
- Dewi, M. H. U. (n.d.). *PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DI DESA WISATA JATILUWIH TABANAN, BALI*. 3(2), 11.
- Dhamotharan, M. (2009). *Handbook on integrated community development: Seven D approach to community capacity development*. Tokyo, Japan: Asian Productivity Organization.
- Harwood, S. (2010). Planning for Community Based Tourism in a Remote Location. *Sustainability*, 2(7), 1909–1923. <https://doi.org/10.3390/su2071909>
- Inskip, E. (1991). *Tourism planning: An integrated and sustainable development approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Kiper, T., & zdemir, G. (2012). Tourism Planning in Rural Areas and Organization Possibilities. In M. Ozyavuz (Ed.), *Landscape Planning*. <https://doi.org/10.5772/39072>
- Kumar, C. (2005). Revisiting 'community' in community-based natural resource management. *Community Development Journal*, 40(3), 275–285. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsi036>

- MacDonald, R., & Jolliffe, L. (2003). Cultural rural tourism. *Annals of Tourism Research*, 30(2), 307–322. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(02\)00061-0](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00061-0)
- Nurhayati, W. (1993). Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*.
- Roberts, L., & Hall, D. R. (Eds.). (2001). *Rural tourism and recreation: Principles to practice*. Wallingford, Oxon, UK; New York, NY: CABI Pub.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 6*. (n.d.).
- Wearing, S., & McDonald, M. (2002). The Development of Community-based Tourism: Rethinking the Relationship Between Tour Operators and Development Agents as Intermediaries in Rural and Isolated Area Communities. *Journal of Sustainable Tourism*, 10(3), 191–206. <https://doi.org/10.1080/09669580208667162>